

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti 2004.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Vol. 1 Pemahaman Awal*. Jakarta. Kencana. 2009.
- Achmad Ruslan, *Teori dan Panduan Praktif Pembentukan peraturan perundang-undangan di indonesia*, Yogyakarta, Rangkang Education, 2011.
- Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Pradana. *Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Rajagrafindo Persada. Depok. 2018.
- Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara. Pustaka Yustisia*. Jakarta. 2016.
- Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Universitas Hasanuddin. Makassar. 2013.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
- Enny Nurbaningsih. *Problematika Pembentukan Peraturan Daerah Aktualisasi Wewenang Mengatur Dalam Era Otonomi Luas*. Rajawali Press. Depok. 2019.
- Dadang Suwanda *Peran Pengawasan DPRD Terhadap LKPJ Dan LPP APBD/LKPD Audited Serta TLHP BPK*. Remaja Rosdakarya. Bandung. 2017
- . *Peningkatan Fungsi DPRD dalam Menyusun Perda Yang Responsif*. Remaja Rosdakarya. Bandung. 2016.
- Dadang Suwanda dan Akmal Malik Piliang. *Penguatan Pengawasan DPRD Untuk Pemerintahan Daerah Yang Efektif*. Remaja Rosdakarya. Bandung. 2016.

- Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah (Suatu kajian teoretis & praktis disertai manual) konsepsi teoretis menuju artikulasi empiris*, Kencana prenda media grup, Jakarta. 2009.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)*, Mirra Buana Media, Yogyakarta. 2020.
- Jazim Hamidi. *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah Menggagas Peraturan Daerah Yang Responsif dan Berkesinambungan*. Prestasi Pustakaraya. Jakarta. 2011.
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010.
- Josef Mario Monteiro. *Pemahaman Dasar Pemerintahan Daerah*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta. 2016.
- Jumadi. *Dasar dan Teknik Pembentukan Perundang-undangan*. Rajawali Press. Jakarta. 2017
- Mahendra Putra Kurnia, dkk. *Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif*. Kreasi Total Media. Yogyakarta. 2007.
- M. Arsyad Mawardi, *Pengawasan dan keseimbangan antara DPR dan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Rasail media group. Semarang. 2013.
- Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar, *Hukum Keuangan Negara Teori Dan Praktik*. Rajagrafindo Persada. Jakarta. 2017.
- Nandang Alamsah, dkk. *Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintahan*, Unpad Press. Bandung
- Ni'matul Huda. *Hukum Tatanegara Indonesia Edisi Revisi*. Rajagrafindo Persada. Depok. 2005.
- Richard W. Bauman And Tsvi Kahana (ed), *The Least Examined Branch, The Role Of Legislatures In The Constitutional State*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Rajagrafindo Persada. Jakarta.2006.

- Saifuddin. *Partisipasi Public Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Yogyakarta. FH UII Press. 2009
- Siswanto Sunarno. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Sinagrafika. Jakarta. 2006.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.
- Srijanti & A. Rahman. *Etika Berwarga Negara (ed.2)*. Salemba Empat, Jakarta, 2008.
- Syahrudin Nawi, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar. 2014.
- VCRAC Crabbe, *Legislatif Drafting*, London: Cavendish Publishing Limited, 1994.
- Wiryanto. *Etik Hakim Konstitusi Rekonstruksi Dan Evolusi Sistem Pengawasan*. Rajagrafindo Persada. Depok. 2019

## **B. Undang-undang**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

PP Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perda Nomor 11 Tahun 1999 seri B Nomor 1 tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum

Perda Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Ditepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar

### **C. Jurnal/Artikel**

Amir Muhiddin, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Peraturan Daerah (Perda), Jurnal Otoritas Ilmu Pemerintahan Vol. Iii No.1 April 2013

Andi Bau Inggit, dkk, *Local Regulation Review in Realizes Legal Order Of The Local Governance*, Journal of Law, Policy and Globalization Vol 59, 2017

Atang Hermawan Usman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol 20 No 1 Februari 2014

Bambang Ady Gunawan, *Tantangan Penjabaran Prinsip-prinsip Demokrasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, Jurnal Al Azhar Islamic Law Review 1 No. 2, 2019.

Dayanto, dkk, *Legislasi Daerah Yang Responsif: Peranan DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah Mengenai Pajak Dan Retribusi Yang Responsif Di Kabupaten Maluku Tengah*, Jurnal Talrev Univ. Tadulako Vol 1 Issues 2 Desember 2016.

Ibrahim Ahmad, *Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Gorontalo Law Review, Volume 1 No. 1 April 2018

Iwan Sulistiyo dkk, *Implementasi Asas Keterbukaan Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Di Kabupaten Kenda*, Jurnal Daulat Hukum 1 No. 1, 2018.

Kezia M. Layuck, dkk. *Pengawasan Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Pusat Menurut UU Nomor 9 Tahun 2015*. Jurnal Lex Administratum, Vol. VIII No. 3 Juli-September 2020.

Nurmiati, dkk. *Kajian Kontribusi PD Parkir dan PD. Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar*, Jurnal Inovasi dan pelayanan Publik Makassar, Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2019.

Salahudin Tunjung Seta, *Hak Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia 17 No. 2, 2020,

Sudikno Mertokusumo (2008) dalam jurnal Ibrahim Ahmad, *Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Gorontalo Law Review, Volume 1 No. 1 April 2018

Tauratiya, *Faktor Penyebab Timbulnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Hukum (Legal Obedience)*, *Asy-Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam*, Vol 3 Nomor 2 Desember 2018

Tomy M Saragih Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang Dan Kawasan. *Jurnal Sasi* Vol. 17 No. 3 Bulan Juli-September 2011.

Yusdianto. *Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 2 Nomor 3. Padjajaran. 2015

#### **D. Berita/Internet**

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4012/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia/>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Ketetapan\\_Majelis\\_Permusyawaratan\\_Rakyat](https://id.wikipedia.org/wiki/Ketetapan_Majelis_Permusyawaratan_Rakyat)

[PD Parkir Makassar Raya Ajukan Revisi Perda 17 Tahun 2006 - Tribun Timur \(tribunnews.com\)](#)

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-cacat-hukum-lt556fa8a2b1100>

[Retribusi Parkir di Makassar Belum Maksimal, Begini Saran Pengamat - Sonora.id](#)

<https://www.sonora.id/read/422280426/jangan-kaget-ada-perbedaan-tarif-parkir-di-makassar-kok-bisa>

[60d3d569dc082-96990aKP-pengumuman-12946-AR.pdf \(kemenkeu.go.id\)](#)

Jangan Kaget, Ada Perbedaan Tarif Parkir di Makassar, Kok Bisa? - Halaman 2 - Sonora.id

<https://makassar.sindonews.com/read/335206/711/penarikan-retribusi-parkir-di-swalayan-bakal-diterapkan-1613350973>

